

# Kepada Buya, Jokowi Akui Sudah Tarik BG

Jawa Pos • Kamis 5 Februari 2015

## Presiden: Semua Selesai Minggu Depan

JAKARTA - Sinyal Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri makin terang. Kali ini sinyal tersebut disampaikan langsung presiden melalui telepon kepada Ketua Tim Independen untuk Menyelesaikan Konflik KPK-

Polri Ahmad Syafii Maarif Selasa malam (3/2). Saat dikonfirmasi hingga tengah malam kemarin (4/2), istana tidak membantah adanya komunikasi antara Presiden Jokowi dan Buya Syafii -sapaan akrab Syafii Maarif- terkait pencalonan Kapolri tersebut. ▶ **Baca Kepada...** Hal 11

menjawab singkat. "Dua-duanya, harus beriringan," lanjut mantan wali kota Solo itu.

Dengan demikian, masyarakat baru bisa mendapatkan kepastian siapa Kapolri baru setelah Jokowi kembali dari lawatan tiga hari ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Hanya, Jokowi tidak memberikan kepastian kapan yang dia maksud sebagai minggu depan itu. "Minggu depan itu bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu," lanjutnya.

Mulai hari ini (5/2) presiden akan meninggalkan tanah air untuk melakukan sejumlah lawatan ke tiga negara ASEAN. Presiden beserta rombongan dijadwalkan tiba kembali di tanah air Senin pekan depan (9/2).

Pada tanggal tersebut, sidang praperadilan atas penetapan status tersangka oleh KPK pada BG yang sempat ditunda juga diagendakan. Praperadilan itu termasuk menjadi bagian penting saat menunggu kepastian presiden mengambil keputusan terkait pelantikan BG.

Sebab, pada sejumlah kesempatan, Jokowi beberapa kali menyampaikan akan menggunakan *timeline* proses praperadilan tersebut ketika mengumumkan keputusannya. Awalnya presiden sempat menyatakan akan menunggu proses praperadilan dulu. Namun, belakangan, setelah putusan penundaan sidang, kalangan istana mulai membuka peluang keputusan bisa diambil sebelum proses praperadilan selesai.

Seakan memperkuat sinyal keputusan Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pernyataannya yang meminta BG mundur merupakan akumulasi dari berbagai opsi yang sebelumnya disampaikan banyak pihak, termasuk Tim Independen (Tim 9) yang diketuai Buya Syafii. "Jadi, opsi itu sudah muncul dari awal," ujarnya.

Pernyataan Pratikno yang meminta BG mundur tersebut sudah disampaikan Wakapolri Badrodin Haiti kepada yang bersangkutan. Namun, BG menyatakan menolak. Tidak hal tersebut. Pratikno

tentu nanti juga akan berkirim surat ke DPR dulu."

### Naik Pangkat

Sementara itu, hari ini Mabes Polri akan menggelar acara rapor kenaikan pangkat bagi 12 perwira tingginya. Salah seorang yang akan naik pangkat adalah Kabareskrim Irjen Budi Waseso yang naik pangkat dari Irjen menjadi Komjen.

Dinding bagian depan gedung Bareskrim kemarin dipasang spanduk berukuran 1,5 x 2 meter. Dalam baliho tersebut terpampang foto Budi Waseso berseragam dinas lengkap dengan pangkat bintang tiga di pundak. Spanduk itu bertuliskan *Welcome to Bareskrim, to protect and serve for justice and humanity*.

Dengan naik pangkatnya Budi, otomatis yang bersangkutan resmi masuk bursa calon Kapolri apabila Jokowi hendak membatalkan pelantikan BG. Sebab, calon Kapolri berasal dari jenderal bintang tiga. Anggota Kompolnas M. Nasser membenarkan hal tersebut. Menurut dia, Kompolnas sudah mengantongi rekam jejak Budi. "Kami sudah intensif memantau dia sejak jadi Kapolda Gorontalo," ungkap Nasser saat dikonfirmasi kemarin.

Perlakuan serupa diberikan kepada seluruh Kapolda. Sebab, dalam beberapa tahun ke depan, sebagian dari mereka akan menjadi calon Kapolri. Meski begitu, pihaknya tetap akan melacak seluruh latar belakang Budi sejak dia menjadi bagian dari korps Bhayangkara.

### Melanggar HAM

Pada bagian lain, Komnas HAM mendesak Presiden Jokowi agar pemilihan Kapolri dilakukan dengan cara terbaik. Seperti yang selama ini dilakukan terhadap calon menteri. Salah satunya dengan meminta masukan dari lembaga terkait seperti PPATK, KPK, dan Komnas HAM. "Hal itu penting untuk menghindari seperti kasus BG ini lagi," tutur Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM untuk Kasus Penangkapan Bambang Widjojanto (BW) Nur Cholis. Menurut Nur Cholis, keputusan

Sebab, BG selama ini masuk *database* pejabat bermasalah di PPATK maupun KPK.

Pada kesempatan yang sama, Nur Cholis juga menyampaikan kesimpulan penanganan laporan penangkapan BW oleh Bareskrim Polri. Setelah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi, Komnas HAM memiliki bukti awal adanya pelanggaran HAM pada penangkapan tersebut.

Bukti awal itu antara lain adanya penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Nur Cholis melihat penangkapan Bambang tidak bisa dilepaskan dari konflik KPK dan Polri yang terjadi setelah penetapan BG sebagai tersangka. "Dan ini kami melihatnya sebagai konflik yang laten," ujarnya. Konflik laten yang dimaksud Komnas HAM adalah serangkaian peristiwa yang selama ini terjadi ketika KPK menangani kasus korupsi di kepolisian. Nur Cholis lantas mengingatkan akan kasus Bibit-Chandra, Susno Duadij, dan Djoko Susilo.

Bukti kedua yang dimiliki Komnas HAM adalah terjadinya penggunaan kekuasaan secara eksekutif yang seharusnya tak perlu dilakukan. Contohnya pengerahan pasukan yang berlebihan, penggunaan laras panjang, pemborngolan, dan ancaman melabkan mulut BW.

"Ini sebuah upaya paksa penanganan perkara yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kenapa tidak didahului dengan pemanggilan Bambang Widjojanto?" ucap Nur Cholis. Hal itu, menurut dia, merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Terakhir, kepolisian dinilai memaksakan kasus BW karena menerapkan pasal 242 dan 55 KUHP yang bisa mengancam profesi para advokat. "Atas dasar itulah Komnas HAM mendesak presiden segera melakukan remedial Bambang dan pimpinan KPK lainnya yang semuanya sedang dilaporkan ke kepolisian," tuturnya.

Remedial bisa dilakukan presiden dengan memulihkan nama baik

**KEPADA...**  
Sambungan dari hal 1

Buya Syafii mengungkap adanya telepon presiden tersebut di depan peserta acara seminar di Jogjakarta kemarin. "Ya, semalam (Selasa malam) Presiden Jokowi menelepon saya dan menyampaikan keputusannya itu untuk batal melantik BG sebagai Kapolri," kata Syafii di depan peserta seminar bertajuk "Menyambut Kongres Umat Islam Indonesia Ke-6" di Universitas Muhammadiyah Jogjakarta tersebut.

Mantan ketua umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu mengaku senang dan segera memberi tahu beberapa koleganya melalui pesan singkat. Keputusan tersebut, menurut dia, sudah sesuai dengan aspirasi dan masukan dari Tim Independen.

Wakil Ketua Tim Independen Jinly Asshiddiqie membenarkan bahwa dirinya juga menerima pesan tersebut dari Syafii. "Itu benar. Secara substansi, tidak ada yang baru, hanya komunikasi politik saja," kata dia. Menurut Jinly, Jokowi baru akan menyampaikan secara resmi dan terbuka setelah hasil praperadilan BG di PN Jakarta Selatan keluar. "Hanya soal waktu saja," lanjut Jinly.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto tidak membantah pernyataan Syafii. "Pembicaraannya pribadi antara presiden dan Syafii Maarif. Kemudian Pak Syafii yang mengungkapkan ke publik," jelas Andi di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Bagaimana tanggapan presiden? Jokowi menyatakan bahwa keputusan terkait calon Kapolri baru diambilnya pekan depan, seputang dirinya dari lawatan ke tiga negara di kawasan ASEAN. Ketika pernyataan Syafii dikonfirmasi, Jokowi tidak membantah ataupun membenarkan. Demikian juga halnya dengan konfirmasi soal informasi bahwa presiden telah menunjuk Irwasum Komjen Pol

Dwi Priyatno. Dwi senior BG satu tingkat. Bukannya lulusan Akpol, Jokowi kembali ke publik minggu depan. "Saya senang semunya minggu depan Jokowi setelah membuka penanganannya di Jakarta kemarin. Per itu diucapkan Jokowi di hadapan awak media. Saat ini ada beberapa hal yang harus selesai sebelum memnash BG. Apakah terkait politik dan hukum, Jokowi